

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan keberlanjutan sebagai topik pada saat ini yang menjadi perhatian dan komitmen banyak pihak, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Indonesia merupakan bagian dari negara G20, dengan menunjukkan komitmen untuk melakukan program pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Maka dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 oleh pemerintah berisi mengenai gerakan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, hal itu bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari 50% bermula pada wilayah hutan dan lahan gambut, 3,8% atas berbagai energi serta transportasi, kemudian 18% pada sebagian pertanian, 1,8% melalui industri, serta 5,9% yang ada pada limbah (OJK, 2014). Pemerintah telah merencanakan pembangunan jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) dengan menyebutkan empat aspek, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Saat ini Indonesia memerlukan dukungan yang cukup tinggi dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi, dengan begitu pemerintah melaksanakan program dengan kerjasama berbagai pihak untuk dapat mengungkapkan laporan keberlanjutan. Sebagai bentuk partisipasi perusahaan menyajikan laporan keberlanjutan, berisi informasi perusahaan yang bersifat akuntabel dan hasil operasional perusahaan, berfungsi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi seluruh para pemangku kepentingan. Perusahaan yang pada kegiatan operasionalnya mempergunakan sumber daya secara efektif dan efisien akan mendapatkan perhatian dari para pemegang saham maupun masyarakat (Afsari, Purnamawati, dan Prayudi, 2017).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perusahaan diharapkan memberikan informasi tambahan yang relevan bagi para pemangku kepentingan (Dilling, 2010). Hal lain yang harus diperhatikan serius oleh setiap perusahaan, bahwa pentingnya keterbukaan dalam proses bisnis untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan

komitmen pembangunan keberlanjutan, sehingga perusahaan dapat menyampaikan partisipasinya melalui pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan keberlanjutan di Indonesia diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan, terkait belum adanya aturan dari pemerintah mengenai laporan keberlanjutan (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan pedoman yang diimplementasikan, dengan memperhatikan kebijakan yang berlaku terkait dengan hubungan pihak pengambil keputusan terhadap pihak pengawas, hal ini mengutamakan kepentingan para pemegang saham (Adila, 2016). Menurut Mahmood, Kouser, Ali, Ahmad, dan Salman (2018), menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan melibatkan pihak luar sebagai pengawas perusahaan, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan, karena perusahaan dituntut menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan adanya pengawasan pada perusahaan. Sehingga menyebabkan perusahaan untuk mengeluarkan informasi mengenai perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan berikut berupa dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan saham institusional.

Dewan komisaris berperan dalam mewujudkan tata kelola yang baik, karena merupakan salah satu komponen mekanisme tata kelola perusahaan (Wulanda, 2017). Dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap laporan keberlanjutan berkaitan dengan semakin baiknya tata kelola perusahaan maka dapat semakin luas perusahaan dalam mengungkapkan informasi (Suryono dan Prastiwi, 2011). Hal ini terjadi karena dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan dewan komisaris, dapat membuat manajemen bersifat semakin transparan dalam memberikan informasi berkaitan dengan perusahaan sehingga, mendorong untuk diungkapkannya laporan keberlanjutan perusahaan.

Dewan komisaris independen merupakan bagian yang bukan dari perusahaan seperti dewan direksi ataupun para pemegang saham serta tidak ada hubungan pribadi dengan perusahaan (Mahmood, dkk., 2018). Dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap laporan keberlanjutan, hal ini disebabkan jika banyak jumlah anggota dewan komisaris independen bertindak sebagai pengawas dengan

bersifat objektif dan independen, maka dapat berdampak semakin tinggi diungkapkannya laporan keberlanjutan (Aliniar dan Wahyuni, 2017).

Komite audit merupakan pihak yang dibuat secara resmi oleh perusahaan, berfungsi untuk perantara bagi dewan direksi dan semua anggota (Suryono dan Prastiwi, 2011). Komite audit memiliki pengaruh terhadap laporan keberlanjutan, karena bila seseorang berperan sebagai komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, maka dalam menjalankan peran tersebut dapat mengerti serta memahami informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sehingga, hal ini dapat mendukung agar diungkapkannya laporan keberlanjutan (Adila, 2016).

Kepemilikan saham institusional yakni saham perusahaan yang kepemunyaannya dikuasai pada beberapa organisasi atau lembaga (Dewi dan Pitriasari, 2019). Kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan perusahaan, karena pihak investor memiliki kekuasaan serta pengawasan kepada manajemen agar tidak menimbulkan asimetri informasi (Dewi dan Pitriasari, 2019). Semakin besar kepemilikan saham institusi, maka semakin mendorong manajemen dalam memberikan informasi lebih yang berupa laporan keberlanjutan (Aliniar dan Wahyuni, 2017).

Motivasi dilakukan penelitian ini karena pada hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan saham institusional tidak mempengaruhi laporan keberlanjutan. Menurut Nazir, Ilham, dan Utara (2014), dewan komisaris tidak berpengaruh pada laporan keberlanjutan, karena tugas dari dewan komisaris tidak hanya memberikan pengawasan pada manajemen. Menurut Adila (2016), dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan, dalam pelaksanaan tugasnya dewan komisaris independen bertugas menilai dan mengawasi manajemen, sehingga kurang dapat memperhatikan pengungkapan informasi. Menurut Aniktia dan Khafid (2015), komite audit tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan, jika pada dasarnya pihak komite audit tidak harus mempunyai ahli atau latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, karena pihak tersebut harus bersikap kompeten pada bidang yang lain, dengan mengetahui informasi penting yang harus

diungkapkan oleh perusahaan, serta mengerti informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Tetapi apabila banyak dari pihak komite audit mempunyai keahlian terhadap bidang akuntansi atau keuangan akan semakin mendukung untuk disajikannya laporan keberlanjutan (Adila, 2016). Menurut Aziz (2014), kepemilikan saham institusional tidak mempengaruhi laporan keberlanjutan, karena para investor institusi merasa cukup puas dengan informasi yang telah disediakan, maka investor cenderung tidak menuntut perusahaan untuk memberikan informasi lebih dengan tidak wajib melaporkan laporan keberlanjutan. Objek penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan perusahaan periode 2015-2018 yang ada pada *factbook* 2018 serta ada pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini membutuhkan laporan keuangan perusahaan dan laporan keberlanjutan disajikan oleh perusahaan dengan *Sustainability Report Index (SRI)* dan diukur dengan menggunakan indikator *Global Reporting Index (GRI)* 4.0.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya latar belakang diatas, maka didapatkan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan perusahaan?
4. Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris terhadap laporan keberlanjutan perusahaan.

2. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap laporan keberlanjutan perusahaan.
3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap laporan keberlanjutan perusahaan.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap laporan keberlanjutan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat akademis
Hasil penelitian ini diperkenankan dapat memberikan kontribusi dan acuan bagi penelitian selanjutnya, mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap laporan keberlanjutan perusahaan.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diperkenankan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi calon investor, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan mengenai laporan keberlanjutan perusahaan, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam investasi secara efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab satu ini berisi mengenai motivasi dilakukan penelitian ini dituangkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua ini berisi mengenai teori, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar, persamaan dan perbedaan penelitian sekarang, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab tiga ini berisi mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi mengenai penjelasan dari gambaran umum objek penelitian ini, deskripsi data yang digunakan pada penelitian ini, hasil analisis data yang telah diolah, serta pembahasan dari penelitian ini.

BAB 5: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab lima berisi mengenai kesimpulan dari dilakukannya penelitian ini, beberapa keterbatasan yang dialami penulis, serta saran dari penulis untuk penelitian berikutnya.